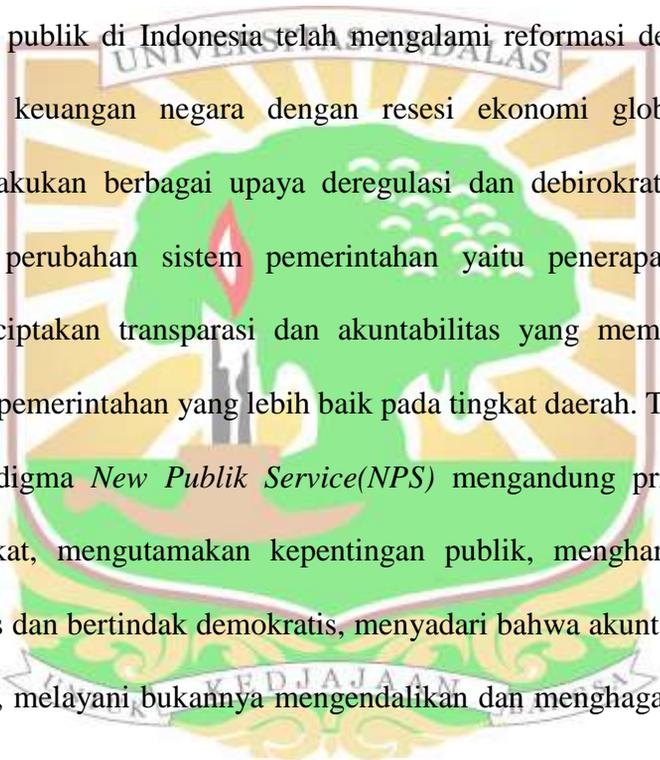


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Pelayanan publik di Indonesia telah mengalami reformasi dengan diawali adanya fenomena krisis keuangan negara dengan resesi ekonomi global, yang mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya deregulasi dan debirokratisasi, upaya tersebut termasuk pula perubahan sistem pemerintahan yaitu penerapan desentralisasi yang berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang memberikan harapan akan tercapainya tata pemerintahan yang lebih baik pada tingkat daerah. Tata pemerintahan yang baik dalam paradigma *New Public Service (NPS)* mengandung prinsip-prinsip melayani warga masyarakat, mengutamakan kepentingan publik, menghargai kewarganegaraan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukanlah suatu hal yang mudah, melayani bukannya mengendalikan dan menghagahi orang, produktivitas semata.

Dalam rangka pembangunan Tata Pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance* kebijakan pemerintah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Pemerintah yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Good Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap dan mau mendengar.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik , pemerintah mengeluarkan **TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998** tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme ,sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut kemudian diterbitkanlah **Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006** Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah . Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Didalam Inpres tersebut Konsep Good Governance dapat dipahami oleh jajaran aparatur Pemerintah, terbatas pada wacana, sesungguhnya aparatur pemerintah tidak hanya di tingkat teratas telah memperlihatkan kemauannya untuk mengikuti perkembangan konsep terbaru Good Governace. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul baru untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diawali dengan konsep Good Governance dan telah lama di sosialisasikan di beberapa kantor, Namun dalam Praktek masih sangat terbatas. Lembaga Administrasi Negara (LAN) kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan kepala **LAN Nomor 239/IX/6/8/2003** perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sabagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah.

LAKIP secara teori harusnya menggambarkan kinerja suatu instansi, namun kenyataannya tidak menggambarkan capaian kinerja suatu instansi melainkan hanya menggambarkan program/kegiatan yang sudah dikerjakan. Hal ini dikarenakan sistem perencanaan yang diterapkan terkadang tidak sesuai dengan yang harus dilaporkan dalam LAKIP. Untuk itu LAKIP perlu dievaluasi, agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja secara terus menerus. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan untuk memberikan gambaran sudah sejauh mana instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil dari penggunaan anggaran. Kriteria penilaian AKIP harus berdasarkan pada **PP No 8 Tahun 2006, Inpres No 7 Tahun 1999**, serta **PermenPAN dan RB No 25 Tahun 2012** tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP, yang mensyaratkan akan sebuah kinerja mulai dari sebuah perencanaan hingga capaian kerjanya.

Dengan di terbitkannya LAKIP bagi Penyelenggara Pemerintah adalah untuk peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya, dan mendorong Pemerintah untuk melaksanakan tugas ,tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas untuk mewujudkan pemerintah yang baik , transparansi dan akuntabilitas, pemerintah kota Padang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan Pembangunan di Kota Padang. Keberhasilan pemerintah daerah tidak lepas dari proses

perencanaan yang berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh BAPPEDA. Tentunya dengan dikeluarkannya **UU Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yang baru terhadap kedudukan, peran, tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

BAPPEDA berperan sebagai unit organisasi perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Bappeda Kota Padang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Padang dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kota serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya.

Adapun bidang- bidang yang membantu dalam pelaksanaan tugasnya adalah:

1. Bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya keuangan
2. Bidang perencanaan sosial, budaya, dan pemerintahan
3. Bidang perencanaan fisik, prasarana, dan penataan ruang
4. Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
5. Bidang penelitian dan pengembangan

Bidang-bidang ini bertugas untuk;

Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, LAKIP, RENSTRA, serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan. dan Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pembangunan pada instansi terkait.



Dalam 2 tahun terakhir LAKIP Bappeda memperlihatkan hasil yang cukup baik yaitu di tahun 2015 dan 2016 Target yang hendak di capai sudah sejalan dengan yang di realisasikan, begitu pula dengan Realisasi Keuangan pada tahun 2015 capaian realisasinya sebesar 90,63%. Sedangkan di tahun 2016 meningkat sebesar 94,94%. Berdasarkan perbandingan kinerja yang dicapai pada tahun 2015 dan 2016, saya sebagai Penulis tertarik ingin membandingkan apakah target yang di rencanakan telah sesuai dengan yang di realisasikan pada LAKIP Bappeda kota Padang tahun 2017 yang di tuangkan dalam bentuk Tugas akhir dengan judul “EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG TAHUN 2017.” Dengan di angkat nya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu dan bekerja sama dengan dengan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Rumusan masalah yang perlu diketahui dalam Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Padang tahun 2017 yaitu :

“Apakah kinerja Bappeda kota Padang tahun 2017 telah sesuai antara program perencanaan dengan yang di realisasikan ?”

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas Tujuan dari Penulisan ini adalah :

Untuk Mengetahui apakah Kinerja Bappeda kota Padang sudah sesuai antara program yang direncanakan dengan yang direalisasikan pada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

1. Penulis dapat membandingkan secara langsung ilmu yang penulis peroleh dari bangku kuliah dan bagaimana penerapan sesungguhnya di pemerintahan.
2. Penulis dapat mengamati langsung berbagai kinerja karyawan di pemerintahan.
3. Penulis menemukan dan mengerti gambaran kerja yang sesungguhnya.

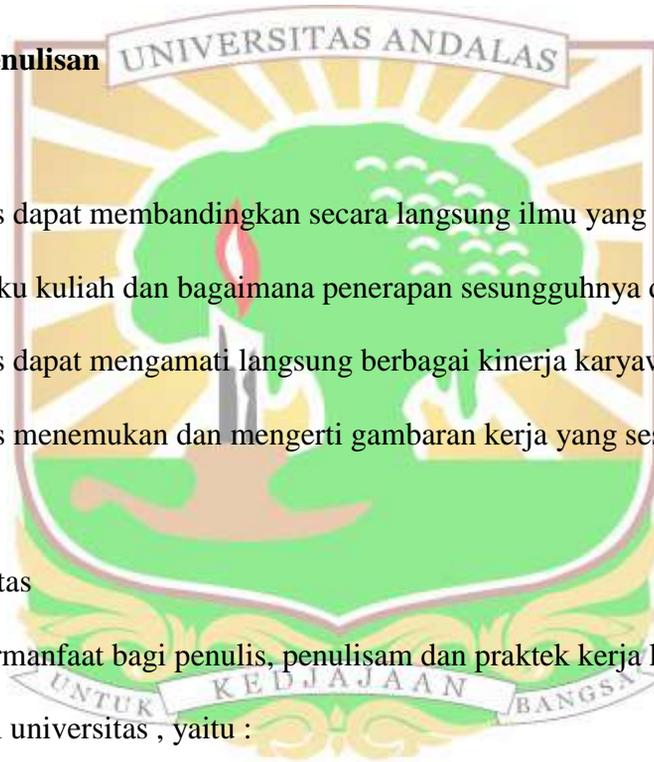
b. Bagi Universitas

Selain bermanfaat bagi penulis, penulisan dan praktek kerja lapangan ini juga bermanfaat bagi universitas , yaitu :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan integritas dalam bidang ilmunya.
2. Sebagai penyempurnaan kurikulum akhir mahasiswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan studinya.

c. Bagi Pemerintahan

Penulisan laporan ini juga bermanfaat bagi pemerintah tempat praktek kerja lapangan yaitu :



1. membantu karyawan untuk menyelesaikan tugasnya
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi tempat praktek kerja lapangan

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan magang sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan : Menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan dan manfaat Penulisan , metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II

Landasan Teori : Landasan teori ini mengemukakan teori-teori yang relevan dengan ini yang menyangkut tentang Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersumber dari buku, internet, dan lain-lain.

BAB III

Gambaran umum Pemerintahan : Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum pemerintahan, yang berisi sejarah berdirinya pemerintahan, visi dan misi pemerintahan makna logo pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan, serta bentuk kegiatan atau aktivitas dalam pemerintahan.

BAB IV

Pembahasan : Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil atau data yang di

dapat selama magang, yaitu Apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda kota Padang tahun 2017 telah sesuai antara program yang direncanakan dengan yang direalisasikan ?

BAB V

Penutup : Berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengamatan dari pelaksanaan kegiatan magang yang telah dilakukan.

